



Selayang Pandang Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI



Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI
2016



SELAYANG PANDANG
PUSAT PENELITIAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI



SELAYANG PANDANG PUSAT PENELITIAN BADAN KEAHLIAN DPR RI



Tim Penyusun:

Pengarah	: Kadir Johnson Rajaguguk, S.H., M.Hum Kepala Badan Keahlian DPR RI
Penanggungjawab	: Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si.
Ketua	: Drs. Humphrey Wangke, M.Si.
Wakil Ketua	: Suhartono, S.I.P., M.P.P.
Sekretaris	: Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.
Anggota	: Rizki Roza, S.I.P., M.Si Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si. Aryoajati Ardiwandanto, S.I.P. Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si. Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn. Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A. Yulia Indahri, S.Pd., M.A. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Percetakan : PT Balai Pustaka (Persero)

Penyunting : Tim Balai Pustaka
Penata Letak : Rahmawati
Perancang Sampul : Aly Ibnu Husein

Sumber Gambar Cover: <http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:MPRDPRbuilding.jpg>



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME berkenaan dengan terbitnya *booklet* tentang Selayang Pandang Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Puslit BKD DPR RI). Penerbitan *booklet* ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkenalkan Badan Keahlian khususnya para peneliti dan lembaga pusat penelitian BKD DPR RI kepada anggota Dewan dan masyarakat luas pada umumnya.

Puslit BKD DPR RI menaungi 73 peneliti yang tersebar di 5 bidang penelitian yaitu Politik Dalam Negeri, Kesejahteraan Sosial, Hubungan Internasional, Hukum, dan Ekonomi dan Kebijakan Publik. Tugas utama para peneliti adalah menyediakan data dan informasi bagi anggota Dewan dalam bentuk antara lain laporan hasil penelitian, jurnal, infosingkat, maupun kajian-kajian singkat terkait dengan tugas dan fungsi kedewanan di bidang anggaran, legislasi, pengawasan, dan diplomasi.

Booklet ini juga dilengkapi dengan Rencana Strategis Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016–2019 dengan maksud agar para pembaca dapat mengetahui lebih jauh tentang visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penelitian di bidang penelitian dan pengkajian dalam mendukung kelancaran wewenang dan tugas DPR RI.

Akhir kata kami mengharapkan lahirnya *booklet* ini dapat meningkatkan kinerja para peneliti dan staf di lingkungan Pusat Penelitian sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga dapat membantu mempercepat proses terwujudnya parlemen modern.

Kepala Badan Keahlian DPR RI

Kadir Johnson Rajaguguk



DAFTAR ISI



- 1 Visi dan Misi Pusat Penelitian
- 2 Bagan Organisasi Badan Keahlian DPR RI
- 3 Bagan Organisasi Pusat Penelitian
- 4 Organisasi
- 6 Pelaksanaan Kegiatan
- 7 Produk Pusat Penelitian
- 8 Cara Permintaan/Pelayanan
- 9 *Standard Operating Procedure*
- 10 Profil Bidang dan Peneliti
- 47 Bab I Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
- 59 Bab II Visi, Misi, dan Tujuan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
- 65 Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan
- 70 Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
- 76 Penutup

PUSAT PENELITIAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



VISI

Menjadi Pusat Penelitian yang profesional, netral, andal, dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya parlemen modern.

MISI

1. Mengoptimalkan dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional, netral, dan akuntabel;
2. Memberikan dukungan keahlian melalui kegiatan pengkajian yang profesional, netral, dan akuntabel;
3. Melakukan pengembangan kepakaran dan kompetensi SDM yang andal.

ORGANISASI

Pusat Penelitian merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Badan Keahlian DPR (BKD). Pusat Penelitian bertugas melaksanakan pengkajian dan analisis situasi dan perkembangan kedewananan. Tugas ini dilaksanakan oleh sebuah tim yang terdiri dari para peneliti yang merupakan salah satu kelompok jabatan fungsional yang terdapat di BKD.

Para peneliti di Pusat Penelitian berjumlah 73 orang, terdiri atas 6 orang Doktor dan 66 orang Magister, yang merupakan lulusan dalam dan luar negeri, berasal dari berbagai disiplin ilmu, baik politik, hubungan internasional, hukum, ekonomi, maupun sosial. Tim Peneliti bekerja dalam 5 (lima) kelompok bidang kajian, yaitu:

Bidang Kajian	Doktor	Kandidat Doktor	Magister	Sarjana
Politik Dalam Negeri	2		4	1
Hubungan Internasional	1	1	5	
Hukum		1	13	
Ekonomi dan Kebijakan Publik		4	22	
Kesejahteraan Sosial	5	1	13	
Jumlah	6	9	57	1



PDN	7
HI	7
Hukum	14
EKP	26
+ KS	19
	73

Pusat Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Pusat setingkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang saat ini dijabat oleh Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si. Beliau merupakan seorang pejabat fungsional Peneliti dengan jenjang Peneliti Madya IV/c.

Dalam menjalankan fungsinya, Pusat Penelitian dibantu oleh Sub-Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub-Bagian Tata Usaha dan 5 (lima) staf dengan susunan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan - RI	Pangkat/ Golongan
1.	Agus Sriyono, S.E.	Kepala Sub-Bagian Tata Usaha	Penata Tk I, III/d
2.	Hasanul Kabri, S.S., M.Si.	Pengadministrasi Umum	Penata Tk I, III/d
3.	Sri Rejeki, S.E.	Pengadministrasi Umum	Penata, III/c
4.	Yeti Ifana, S.E.	Pengadministrasi Umum	Penata, III/c
5.	Supriyanto	Pengadministrasi Umum	Pengatur Tingkat I, II/d
6.	Panji Fitrianto	Pengadministrasi Umum	Pengatur Muda Tk I, II/b

PUSAT PENELITIAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

-  Gedung Nusantara I, Lantai 2 Jakarta 10270
-  Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Gd. Nusantara I, Lantai 2
Jakarta 10270
-  021 5715 409
-  021 5715 290

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian, antara lain adalah:

- 1) Meneliti berbagai topik yang relevan dengan perkembangan kedewanan untuk dijadikan usulan kepada Alat Kelengkapan Dewan dalam membahas berbagai kebijakan dengan pemerintah;
- 2) Menyusun berbagai kajian atas permintaan Pimpinan-pimpinan Dewan, Alat Kelengkapan Dewan, dan Komisi;
- 3) Menerbitkan Jurnal Ilmiah KAJIAN secara berkala (tiga bulan sekali) dan Jurnal Politica, Jurnal Negara Hukum, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, serta Jurnal Aspirasi yang juga diterbitkan secara berkala (masing-masing enam bulan sekali) sebagai sarana publikasi hasil penelitian maupun kajian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk diberikan kepada Anggota Dewan sebagai masukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- 4) Menerbitkan buku-buku hasil penelitian atau kajian terhadap isu-isu yang berkembang untuk diberikan kepada Anggota DPR RI sebagai masukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
- 5) Menyelenggarakan seminar/workshop/diskusi tentang berbagai isu yang sedang berkembang untuk bahan masukan kepada DPR RI.



PRODUK PUSAT PENELITIAN

1. Informasi dan daftar pertanyaan untuk rapat-rapat seperti Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum DPR.
2. *Background papers* untuk kebutuhan tertentu.
3. Kajian dan analisis singkat terhadap isu tertentu.
4. Analisis mendalam (*In-depth Analysis*).
5. Riset atas topik-topik yang dibutuhkan DPR.
6. Pendampingan dalam pembahasan RUU, Pansus Pengawasan, pembahasan anggaran, dan pelaksanaan diplomasi parlemen.



CARA PERMINTAAN/PELAYANAN

1. Mendarati langsung kantor Pusat Penelitian dan menemui peneliti yang dibutuhkan.
2. Menyampaikan permintaan informasi, kajian, dan analisis melalui staf pribadi dengan surat resmi yang ditandatangani Anggota DPR yang membutuhkan, yang ditujukan pada Kepala Badan Keahlian DPR RI dengan tembusan pada Kepala Pusat Penelitian.
3. Melalui telepon langsung dengan peneliti yang dibutuhkan/staf penerima.
4. Melalui e-mail ke peneliti yang dibutuhkan.
5. Mengundang peneliti yang dibutuhkan untuk mendatangi anggota DPR di ruang kerja.
6. Untuk permintaan yang disampaikan langsung oleh Anggota DPR, surat permintaan resmi dapat disampaikan menyusul, yang ditandatangani oleh anggota DPR yang memintanya.



STANDARD OPERATING PROCEDURE

1. Untuk informasi atau kajian singkat dibutuhkan waktu penyelesaian minimal 3 hari kerja.
2. Untuk *in-depth analysis* dibutuhkan waktu minimal 7 s.d. 14 hari kerja.
3. Untuk permintaan melakukan penelitian lapangan (*field research*) dibutuhkan waktu minimal 8 s.d. 12 minggu.
4. Untuk permintaan yang dilakukan melalui surat atau secara tidak langsung atau melalui Kepala Pusat Penelitian, Kepala Pusat Penelitian selanjutnya menunjuk peneliti yang harus meresponsnya.
5. Jika diperlukan, Kepala Pusat Penelitian dapat membentuk Kelompok atau Tim Kerja.
6. Kepala Pusat Penelitian bertanggung jawab menilai kualitas pekerjaan yang dilakukan peneliti dalam merespons permintaan Anggota DPR, selain penilaian yang dilakukan oleh *peer group* masing-masing
7. Jika perlu dilakukan, Kepala Pusat Penelitian dapat memperbaiki kualitas pekerjaan yang dilakukan peneliti dalam merespons permintaan Anggota DPR.
8. Komplain atas hasil kerja peneliti dapat disampaikan kepada peneliti yang bersangkutan dan juga Kepala Pusat Penelitian untuk perbaikan hasil kerja dan pelayanan di kemudian hari.

PROFIL BIDANG DAN PENELITI

1. Bidang Politik Dalam Negeri

Melakukan penelitian, pengkajian, dan analisis mengenai:

- Kelembagaan negara: keparlemenan, kepresidenan, keyudikatifan, dan lain-lain.
- Kelembagaan politik: kepartaian, sistem pemilu, organisasi masyarakat, LSM, dan lain-lain.
- Kedaerahan: pemerintah daerah, DPRD, hubungan pusat-daerah.
- Komunikasi massa, pers, media-cetak dan elektronik, dan lain-lain.
- Politik lokal dan otonomi daerah.
- Birokrasi dan aparatur negara.
- Pertahanan.

Nama	Jabatan	Kepakaran
Drs. Prayudi, M.Si.*)	Peneliti Utama IV/d	Politik Pemerintahan Indonesia
Riris Katharina, S.Sos., M.Si.*)	Peneliti Madya IV/c	Administrasi Publik
Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.	Peneliti Madya IV/b	Komunikasi Politik
Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.	Peneliti Madya III/d	Komunikasi
Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.	Peneliti Muda III/c	Politik dan Pemerintahan Indonesia
Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, S.I.P., M.P.A.	Peneliti Muda III/c	Kebijakan dan Administrasi Publik
Aryojati Arkipandanto, S.I.P.	Peneliti Pertama III/b	Politik dan Pemerintahan Indonesia

*) Sedang menempuh studi doktoral



Ahmad Budiman, Drs., M.Pd.

Peneliti Madya IV/b

Kepakaran Komunikasi Politik

a.budiman69@gmail.com

Lahir di Jakarta, 22 April 1969. Menyelesaikan pendidikan S1 Komunikasi/Kehumasan, Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (IISIP) Jakarta (1993) dan pendidikan S2 Program Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (PEP) Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta (2004). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Peningkatan Citra Bangsa melalui Kemandirian Industri Pertahanan", "Revitalisasi Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Komunitas", dan "Jaminan Keterbukaan Informasi Publik".



Aryoijati Arditipandanto, S.IP.

Peneliti Pertama III/b

Kepakaran Politik dan Pemerintahan Indonesia

aryoijati.arditipandanto@gmail.com

Lahir di Bandung, 1 Agustus 1980. Menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Langlangbuana (Yayasan Bhakti Bhakti Polri) Bandung (2003). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Implementasi Kekuasaan Politik Gubernur Joko Widodo dalam Meningkatkan Praktek Good Governance", "Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014: Sebuah Analisis", dan "Perspektif Politik Kelembagaan dalam Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)".



Debora Sanur Lindawaty, S.Sos., M.Si.

Peneliti Muda III/c

Kepakaran Politik dan Pemerintahan Indonesia

debora.sanur@dpr.go.id

Lahir di Jakarta, 31 Oktober 1982. Menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta (2005) dan pendidikan S2 Ilmu Politik, Universitas Indonesia (2008). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara dalam Perspektif Akademisi dan Masyarakat", "Pengembangan TIK dalam Kerangka Peningkatan Keamanan Nasional di Daerah", dan "Urgensi Membangun Parlemen Modern".



Dewi Sendhikasari Dharmasingtias, S.I.P., M.P.A.

Peneliti Muda III/c

Kepakaran Kebijakan dan Administrasi Publik

dewi.sendhikasari@dpr.go.id

Lahir di Jakarta, 18 April 1986. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta (2007) dan pendidikan S2 Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2009). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Implementasi Pembiayaan Urusan Pemerintahan di Daerah", "Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Kesiapannya Menghadapi Pemilu Serentak", dan "Peranan BPKP dalam Akuntabilitas Lembaga Publik"



Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.

Peneliti Madya III/d

Kepakaran Komunikasi.

handrini.ardiyanti@dpr.go.id

Lahir di Semarang, 15 Januari 1975. Menyelesaikan pendidikan S1 Komunikasi Universitas Diponegoro (1998) dan pendidikan S2 Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia (2008). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Konstruksi Sistem Komunikasi dalam Kelembagaan Industri Pertahanan", "Penataan Pengaturan Lembaga Penyiaran Swasta", dan "Humas Parlemen".



Prayudi, Drs., M.Si.

Peneliti Utama IV/d

Kepakaran Politik Pemerintahan Indonesia

prayudi@yahoo.com

Lahir di Bogor, 21 November 1965. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta (1989) dan pendidikan S2 Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia (2004). Saat ini sedang menyelesaikan Program Doktoral di Program Doktoral Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia. Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "UU Desa dan Harapan Demokrasi Partisipatoris", "Politik Binwas Provinsi terhadap Kabupaten/Kota (Kasus Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan)", dan "Posisi Birokrasi dalam Persaingan Pilkada".



Riris Katharina, S.Sos., M.Si.

Peneliti Madya IV/c

Kepakaran Administrasi Publik

riris.katharina@dpr.go.id

Lahir di Medan, 28 Februari 1973. Menyelesaikan pendidikan S1 Administrasi Negara Universitas Diponegoro (1996) dan pendidikan S2 Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Indonesia (2004). Saat ini sedang menyelesaikan Program Doktoral di Program Doktoral Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Indonesia sejak tahun 2012. Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "DPR RI dan e-Parlemen", "Relasi Kerja KPU Daerah dengan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak", dan "Bentuk Akuntabilitas Kinerja Pemerintah".

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI (PDN)



021 5715 360

2. Bidang Hukum

Melakukan penelitian, pengkajian, dan analisis mengenai:

- Hukum tata negara/konstitusi;
- Hukum dan pemerintahan;
- Peraturan perundang-undangan;
- Penegakan hukum;
- Hukum pidana;
- Hukum internasional;
- Hukum ekonomi;
- Hukum perdata;
- Hukum agraria; dan
- Hak Asasi Manusia.



Nama	Jabatan	Kepakaran
Puteri Hikmawati, S.H., M.H.	Peneliti Madya IV/c	Hukum Pidana
Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.	Peneliti Madya IV/b	Hukum Konstitusi
Dian Cahyaningrum, S.H., M.H.	Peneliti Madya IV/a	Hukum Ekonomi
Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.*)	Peneliti Madya IV/a	Hukum Pidana
Novianti, S.H., M.H.	Peneliti Madya IV/a	Hukum Internasional
Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.	Peneliti Madya IV/a	Hukum Ekonomi
Denico Doly, S.H., M.Kn.	Peneliti Muda III/d	Ilmu Hukum
Monika Suhayati, S.H., M.H.	Peneliti Muda III/d	Ilmu Hukum
Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.	Peneliti Muda III/d	Ilmu Hukum
Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.	Peneliti Muda III/d	Ilmu Hukum

Nama	Jabatan	Kepakaran
Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.	Peneliti Muda III/c	Ilmu Hukum
Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.	Peneliti Muda III/c	Ilmu Hukum
Marfuatul Latifah, S.HI, LLM.	Peneliti Muda III/c	Ilmu Hukum
Prianter Jaya Hairi, S.H., LLM.	Peneliti Muda III/c	Ilmu Hukum

*) Sedang menempuh studi doktoral



Denico Doly, S.H., M.Kn.

Peneliti Muda III/d

Kepakaran Ilmu Hukum

nico_tobing@yahoo.com

Lahir di Jakarta, 8 Desember 1983. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Lampung (2007) dan pendidikan S2 Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (2009). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia dalam Perspektif Hukum", "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Responsif", dan "Penegakan Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Tantangan dan Prospek".

Dian Cahyaningrum, S.H., M.H.

Peneliti Madya IV/a

Kepakaran Hukum Ekonomi

cahyaningrum@yahoo.com

Lahir di Demak, 1 Mei 1973. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang (1996) dan pendidikan S2 Ilmu Hukum (Ekonomi) Universitas Indonesia (2004). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik (E-commerce) dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN", "Politik Hukum Kepemilikan Asing pada Perbankan Nasional", dan "Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Ketentuan Hutan Adat dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan".





Harris Yonatan Parmahan Sibuea, S.H., M.Kn.

Peneliti Muda III/c

Kepakaran Ilmu Hukum

harris_sibuea@yahoo.com; harris.sibuea@dpr.go.id

Lahir di Jakarta, 11 September 1984. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Trisakti (2007) dan pendidikan S2 Magister Kenotariatan Universitas Indonesia (2009). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Tinjauan Yuridis atas Pemanfaatan Ruang di Bawah Tanah", "Inventarisasi Pemetaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia", dan "Kedudukan Pengguna Narkotika dan Kesiapan Fasilitas Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"

Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

Peneliti Madya IV/a

Kepakaran Hukum Pidana

lidyodhi@yahoo.com

Lahir di Plaju, 29 April 1970. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (1995) dan pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran (2005). Saat ini sedang menyelesaikan Program Doktoral di Universitas Indonesia. Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Kebijakan Kriminal dalam Pemberantasan Korupsi Pengelolaan Migas", "Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup", "KPK sebagai Trigger Mechanism dalam Sistem Peradilan Pidana".

Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn.

Peneliti Muda III/c

Kepakaran Ilmu Hukum

febi_80@yahoo.com

Lahir di Padang, 29 Februari 1980. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Padjajaran (2003) dan pendidikan S2 Magister Kenotariatan Universitas Indonesia (2009). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Pemufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi", "Kendala Yuridis Implementasi BPJS Ketenagakerjaan", dan "Advokasi Hukum oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)"



Marfuatul Latifah, S.H.I, LLM.

Peneliti Muda III/c

Kepakaran Ilmu Hukum

marfulatifa@gmail.com

Lahir di Jakarta, 30 November 1984. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007) dan pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2009). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah “Pengaturan Jalur Khusus dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana”, “Kewenangan Penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, dan “Penghapusan Tahapan Penyelidikan dalam RUU tentang Hukum Acara Pidana”.



Monika Suhayati, S.H., M.H.

Peneliti Muda III/d

Kepakaran Ilmu Hukum

monika.suhayati@dpr.go.id

Lahir di Jakarta, 12 September 1979. Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Universitas Indonesia (2003) dan pendidikan S2 Magister Hukum Universitas Indonesia (2006). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah “Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”, “Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah”, dan “Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”.



Novianti, S.H., M.H.

Peneliti Madya IV/a

Kepakaran Hukum Internasional

novi_dpr@yahoo.com

Lahir di Solok, Sumatera Barat 16 November 1965. Menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang (1990) dan pendidikan S2 Fakultas Hukum Tarumanegara (2000). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah “Penjabaran *UN Convention Against Corruption (UNCAC)* dalam Hukum Nasional terkait dengan Pencegahan Korupsi oleh Pemerintah Pusat”, “Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional”, dan “Konvensi Hak Anak terkait dengan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan”.



Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Peneliti Madya IV/b

Kepakaran Hukum Konstitusi

nmhantoro@yahoo.com

Lahir di Semarang 11 November 1971. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (1995) dan pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kehidupan Kenegaraan) Universitas Indonesia (2004). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah “Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014”, “Potensi Sengketa Kewenangan di Wilayah Laut dan Penyelesaiannya”, dan “Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Menghentikan Praktek Hukum Liberal”.



Priantor Jaya Hairi, S.H., LLM.

Peneliti Muda III/c

Kepakaran Ilmu Hukum

priantor.hairi@dpr.go.id

Lahir di Palembang, 6 Oktober 1984. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (2002) dan pendidikan S2 Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2009). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Urgensi Penguatan Kewenangan Komnas HAM", "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya", dan "Penegakan Hukum di Laut oleh Pemerintah Daerah".



Puteri Hikmawati, S.H., M.H.

Peneliti Madya IV/c

Kepakaran Hukum Pidana

puterihw@yahoo.com

Lahir di Yogyakarta, 19 Mei 1965. Menyelesaikan pendidikan S1 Praktisi Hukum Universitas Indonesia (1989) dan pendidikan S2 Hukum Pidana Universitas Indonesia (2000). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Penyadapan dalam Hukum di Indonesia: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum", "Pemeriksaan LHKPN dalam Pencegahan Korupsi oleh KPK", dan "Pelaksanaan Diversi pada Pemeriksaan Perkara Anak di Sidang Pengadilan".



Shanti Dwi Kartika, S.H., M.Kn.

Peneliti Muda III/d

Kepakaran Ilmu Hukum

shanti.kartika@dpr.go.id; shanti.dk@gmail.com

Lahir di Yogyakarta, 20 Mei 1981. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Janabada Yogyakarta (2003) dan pendidikan S2 Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2009). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Kedudukan Kantor Perwakilan Komnas HAM di Daerah", "Hubungan Pusat dan Daerah dalam Tata Ruang Laut dan Zonasi", dan "Politik Hukum Pemberantasan Korupsi: Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Jokowi".



Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.

Peneliti Madya IV/a

Kepakaran Hukum Ekonomi

susidhan@yahoo.com; sulasi.rongiyati@dpr.go.id

Lahir di Banyumas, 1 April 1968. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (1991) dan pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum (Ekonomi) Universitas Indonesia (2004). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Pengembangan Perbankan Syariah melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah", "Peran Legislasi dalam Pembangunan Ekonomi Daerah", dan "Peran Negara dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi".



Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H.

Peneliti Muda III/d

Kepakaran Ilmu Hukum

triaspalupikurnianingrum@yahoo.com

Lahir di Semarang, 5 Juli 1982. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (2006) dan pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2008). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Urgensi Penggantian Undang-Undang tentang Hak Cipta", "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Bapas di dalam Sistem Peradilan Anak", dan "Analisis Yuridis Pentingnya Kesepahaman ASEAN Competition Policy Jelang ASEAN Economic Community 2015".

BIDANG HUKUM



021 5715 881

3. Bidang Hubungan Internasional

Melakukan penelitian, pengkajian, dan analisis mengenai:

- Politik luar negeri Indonesia.
- Perkembangan kawasan.
- Organisasi internasional.
- Politik dan keamanan internasional.
- Ekonomi internasional.
- Lingkungan hidup global.
- Sosial dan budaya global.
- Kerja sama bilateral dan multilateral.



Nama	Jabatan	Kepakaran
Prof. Dr. Phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.	Profesor Riset/ Peneliti Utama IV/e	Hubungan Internasional
Drs. Humphrey Wangke, M.Si.*)	Peneliti Utama IV/d	Hubungan Internasional
Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si.	Peneliti Madya IV/c	Hubungan Internasional
Dra. Adirini Pujayanti, M.Si.	Peneliti Madya IV/b	Hubungan Internasional
Rizki Roza, S.I.P., M.Si.	Peneliti Muda III/c	Hubungan Internasional
Lisbet, S.I.P., M.Si.	Peneliti Muda III/c	Hubungan Internasional
Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.	Peneliti Muda III/c	Hubungan Internasional

*) Sedang menempuh studi doktoral



Adirini Pujayanti, Dra., M.Si.

Peneliti Madya IV/b

Kepakaran Hubungan Internasional

adirini.pujayanti@dpr.go.id

Lahir di Jakarta, 5 September 1967. Menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional Universitas Nasional (1992) dan pendidikan S2 Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia (2002). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Karantina dan Politik Luar Negeri Indonesia masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono", "Kebijakan Luar Negeri Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan dan Manfaatnya bagi Indonesia", dan "Parlemen dan *Interfaith Dialogue*: Upaya Menjaga Stabilitas Keamanan dan Perdamaian Dunia".



Humphrey Wangke, Drs., M.Si.

Peneliti Utama IV/d

Kepakaran Hubungan Internasional

dhanny_2000@yahoo.com

Lahir di Jember, 12 Mei 1961. Menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional Universitas Jember (1987) dan pendidikan S2 Magister Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia (1998). Saat ini sedang menyelesaikan Program Doktoral di Universitas Indonesia. Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Upaya Peningkatan Kerja Sama Indonesia-AS di Sektor Pertambangan: Pengelolaan Berkelanjutan pada PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara", "Pengaturan Perdagangan Lintas Batas Antar-Negara: Memacu Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Belu", dan "Implementasi Pengelolaan Hutan secara Berkelanjutan melalui Kerja Sama Luar Negeri".



Lisbet, S.I.P., M.Si.

Peneliti Muda III/c

Kepakaran Hubungan Internasional

lisbet.sihombing@dpr.go.id

Lahir di Jakarta, 31 Januari 1983. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional (2005) dan pendidikan S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (2008). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Kepentingan Nasional Amerika Serikat di Inter-Parliamentary Union", "Pentingnya Peran Pelabuhan HubInternasional di Indonesia pada Era Globalisasi", "Bantuan Luar Negeri di Bidang Energi Terbarukan", dan "Kebijakan Luar Negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Upaya Meningkatkan Kerja Sama Perdagangan Luar Negeri Indonesia".

Poltak Partogi Nainggolan, Prof. Dr. phil., M.A.

Research Professor Hubungan Internasional dengan *field of researches* masalah-masalah politik, demokrasi, keamanan, *political-economy*, dan *non-traditional security threats*.

ppotgin@yahoo.com

Lahir di Jakarta, 26 Juni 1963. Menyelesaikan pendidikan S1 (Drs) pada Departemen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial (FIS) Universitas Indonesia (1986), pendidikan S2 (MA) pada Departemen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional the University of Birmingham (UK) (1999), dan pendidikan S3 (Dr.) pada Departemen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg (Deutschland) (2011), dengan *judicium magna cum laude*. Tulisan terakhir yang telah diterbitkan adalah "Poros Maritim Dunia dan Respons Negara Lain", "Ancaman Keamanan di sekitar Alur Laut Kepulauan Indonesia," dan "Kemitraan Strategis Indonesia di Tengah Rivalitas As-RRC".



Rizki Roza, S.I.P., M.Si.

Peneliti Muda III/c

Kepakaran Hubungan Internasional

rizki.roza@dpr.go.id

Lahir di Jambi, 17 Februari 1982. Menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2003) dan pendidikan S2 Hubungan Internasional Universitas Indonesia (2007). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Modernisasi Militer", "Kerja Sama Internasional dan Peran Industri Sipil dalam Industri Pertahanan", dan "Confidence Building Measures dan Program Nuklir Iran".



Simela Victor Muhamad, Drs., M.Si.

Peneliti Madya IV/c

Kepakaran Hubungan Internasional

simela.muhammad@dpr.go.id; victorsimela@yahoo.co.id

Lahir di Bandung, 26 Februari 1962. Menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1986) dan pendidikan S2 Program Studi Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia (1999). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "DPR RI dan Isu Palestina: Diplomasi Antarparlemen", "Indonesia dan Keamanan Maritim di Kawasan", dan "Kejahatan Transnasional Penyaludungan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia: Kasus di Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat".



Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si.

Peneliti Muda III/c

Kepakaran Hubungan Internasional

sita.hidriyah@dpr.go.id

Lahir di Surabaya, 18 Oktober 1982. Menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Atmajaya Jakarta (2005) dan pendidikan S2 Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia (2008). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Dinamika Permasalahan Pekerja Tambang Indonesia pada Perusahaan Tambang AS yang Beroperasi di Indonesia", "Peningkatan Kerja Sama Pembangunan Negara Indonesia dan Australia pada Penanggulangan Bencana", dan "Upaya Pemerintah dan Kerja Sama Luar Negeri dalam Pengentasan Kemiskinan Menuju Pembangunan Berkelanjutan".

**BIDANG
HUBUNGAN INTERNASIONAL (HI)**



021 5715 367

4. Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik

Melakukan penelitian, pengkajian, dan analisis mengenai:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Keuangan dan perbankan.
- Manajemen dan pembangunan.
- Investasi dan industri.
- Kebijakan publik.

Nama	Jabatan	Kepakaran
Mandala Harefa, S.E., M.E.	Peneliti Utama IV/d	Kebijakan Ekonomi Publik
Hariyadi, S.I.P., M.P.P.	Peneliti Madya IV/b	Kebijakan Publik
Drs. Juli Panglima Saragih, M.M.	Peneliti Madya IV/b	Kebijakan Publik
Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.	Peneliti Madya IV/a	Kebijakan Publik
Suhartono, S.I.P., M.P.P.	Peneliti Madya IV/a	Kebijakan Publik
Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.	Peneliti Muda III/d	Ekonomi Terapan
Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.	Peneliti Muda III/d	Ekonomi Terapan
Eka Budyanti, S.Si., M.S.E.	Peneliti Muda III/d	Ekonomi Terapan
Lukman Adam, S.Pi., M.Si.	Peneliti Muda III/d	Ilmu Kebijakan
Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, S.T., M.B.A.	Peneliti Muda III/d	Kebijakan Publik
Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak., C.A.	Peneliti Muda III/d	Ekonomi Terapan
Yuni Sudarwati, S.I.P., M.Si.	Peneliti Muda III/d	Bisnis dan Manajemen
Achmad Wirabrata, S.T., M.M.	Peneliti Muda III/c	Kebijakan Publik
Dewi Restu Mageswuri, S.E., M.Si.	Peneliti Muda III/c	Ekonomi Terapan
Dewi Wuryandani, S.T., M.M.	Peneliti Muda III/c	Kebijakan dan Adminsitrasni

Nama	Jabatan	Kepakaran
Izzaty, S.T., M.E.	Peneliti Muda III/c	Kebijakan Publik
Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.	Peneliti Muda III/c	Kebijakan dan Administrasi
Rafika Sari, S.E., M.S.E.	Peneliti Muda III/c	Kebijakan Publik
Rasbin, S.TP, M.S.E.*)	Peneliti Muda III/c	Ekonomi Terapan
Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.	Peneliti Muda III/c	Ekonomi Terapan
T. Ade Surya, S.T., M.M.	Peneliti Muda III/c	Kebijakan Publik
Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.*)	Peneliti Muda III/b	Ekonomi Terapan
Hilma Meilani, S.T., M.B.A.*)	Peneliti Muda III/b	Ekonomi Terapan
Iwan Hermawan, S.P., M.Si.*)	Peneliti Muda III/b	Ekonomi Terapan
Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.	Peneliti Muda III/b	Ekonomi Terapan
Lisnawati, S.Si., M.S.E.	Peneliti Pertama III/b	Ekonomi Terapan

*}) Sedang menempuh studi doktoral



Achmad Wirabrata, S.T., M.M.

Peneliti Muda III/c

Kepakaran Kebijakan Publik

awirabrata@yahoo.com

Lahir di Ujung Pandang, 24 Desember 1977. Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Mesin Universitas Trisakti (2003) dan pendidikan S2 Manajemen Operasi, Sekolah Tinggi Menejemen PPM (2006). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi", "Pengembangan Energi Surya di Indonesia", dan "Prospek, Kendala dan Dukungan Kebijakan dalam Menghadapi ASEAN Open Sky".



Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.

Peneliti Madya IV/a

Kepakaran Kebijakan Publik

sani_alhusain@yahoo.com

Lahir di Cimahi, 11 Mei 1972. Menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi Manajemen Universitas Padjadjaran, Bandung (1998) dan pendidikan S2 *Master of Art in Economic Policy Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta, USA* (2002). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kreatif", "Kebijakan Pemerataan Pembangunan Daerah di Indonesia", dan "Upah Minimum: Kebijakan, Permasalahan, Analisis, dan Solusi".



Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

Peneliti Muda III/d

Kepakaran Ekonomi Terapan

ari.ginting@dpr.go.id

Lahir di Jakarta, 2 Mei 1981. Menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen Keuangan Universitas Indonesia (2006) dan pendidikan S2 Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia (2008). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Analisis Pengaruh Korupsi terhadap Kemiskinan di Indonesia", "Pengaruh Perkembangan Kredit Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", dan "Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antar-wilayah terhadap Kemiskinan di Indonesia 2004–2013".



Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.

Peneliti Muda III/b

Kepakaran Ekonomi Terapan

ariesy.t.mauleny@dpr.go.id

Lahir di Palembang, 26 Maret 1975. Menyelesaikan pendidikan S1 Fisika Material Universitas Indonesia (1998), pendidikan S2 Studi Keuangan Pusat dan Daerah Universitas Indonesia (2007), dan saat ini sedang menyelesaikan Program Doktoral di Pendidikan Doktor Ilmu Ekonomi, FEB, Universitas Indonesia sejak tahun 2013. Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Aglomerasi, Perubahan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Jakarta", "Kebijakan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Mendukung Perekonomian Nasional", dan "APBN 2016 dan Tantangan Target Pertumbuhan Ekonomi".



Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Peneliti Muda III/c

Kepakaran Ekonomi Terapan

mangeswuri@yahoo.com

Lahir di Klaten, 6 Mei 1982. Menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi Akuntansi STIE YKPN Yogyakarta (2004) dan pendidikan S2 Akuntansi STIE YKPN Yogyakarta (2006). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Peran Lembaga Pengawas dalam Persaingan Usaha", "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Perimbangan Daerah (Studi Kasus Kabupaten Banjar dan Kota Denpasar)", dan "Perkembangan Ketersediaan dan Kebutuhan Perumahan di Batam".

Dewi Wuryandani, S.T., M.M.

Peneliti Muda III/c

Kepakaran Bidang Kebijakan dan Adminsitrasional

dewi.wuryandani@gmail.com

Lahir di Jakarta, 13 Agustus 1979. Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Kimia Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (2002) dan pendidikan S2 Manajemen Keuangan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2004). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Kebijakan Ketenagakerjaan Indonesia", "Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Hubungan Industrial di Indonesia dan Jaminan Kesejahteraan Tenaga Kerja", dan "Kebijakan Privatisasi BUMN melalui Pasar Modal".

Edmira Rivani, S.Si., M.Stat.

Peneliti Muda III/d

Kepakaran Ekonomi Terapan

rif_green@yahoo.com

Lahir di Jakarta, 10 September 1986. Menyelesaikan pendidikan S1 Statistika Universitas Padjadjaran (2008) dan pendidikan S2 Statistika Terapan Universitas Padjadjaran (2009). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Perubahan Struktur Tenaga Kerja dan Analisis Multidimensional Scaling (MDS), dalam Mengelompokkan Penyerapan Tenaga Kerja di Berbagai Provinsi", "Peningkatan Daya Saing Industri Indonesia dalam Menghadapi ASEAN China Free Trade Area", dan "Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Berkelanjutan".

**Eka Budiyanti, S.Si., M.S.E.**

Peneliti Muda III/d

Kepakaran Ekonomi Terapan

eqq_blue@yahoo.com

Lahir di Jakarta, 22 Januari 1984. Menyelesaikan pendidikan S1 Matematika Universitas Padjadjaran (2006) dan pendidikan S2 Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia (2008). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Pengaruh Kebijakan Moneter terhadap Kinerja Sektor Industri Manufaktur di Indonesia", "Peran Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Sektor Perikanan", dan "Peran Investasi terhadap Sektor Ekonomi di Indonesia: Implikasi dalam Rangka Menuju MEA".

**Hariyadi, S.I.P., M.P.P.**

Peneliti Madya IV/b

Kepakaran Kebijakan Publik

farahhar@yahoo.com

Lahir di Banyumas, 11 Desember 1970. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1995) dan pendidikan S2 *Business, Economics and Policy Studies* Universiti Brunei Darussalam (2002). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Pelaksanaan Kebijakan Moratorium Pembukaan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut", "Efektivitas Implementasi Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kehutanan Menyongsong RPJMN 2015–2019", dan "Optimalisasi Peran Panas Bumi dalam Kerangka UU Panas Bumi".

**Hilma Meilani, S.T., M.B.A.**

Peneliti Muda III/b

Kepakaran Ekonomi Terapan

hilma.meilani@dpr.go.id

Lahir di Kudus, pada 8 Mei 1977. Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2002), pendidikan S2 Finance Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2008), dan saat ini sedang menyelesaikan program Doktoral di Program Doktoral Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia sejak tahun 2013. Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal", "Sistem dan Prosedur Pajak Daerah", dan "Restribusi Daerah serta Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Volume Perdagangan Daerah".



Iwan Hermawan, S.P., M.Si.

Peneliti Muda III/b

Kepakaran Ekonomi Terapan

iwan.hermawan@dpr.go.id

Lahir di Malang, 11 Juni 1978. Menyelesaikan pendidikan S1 Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Brawijaya (2002), pendidikan S2 Studi Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor (2008), dan saat ini sedang menyelesaikan program Doktoral Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia sejak tahun 2013. Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Analisis Daya Saing Rempah Indonesia di Pasar ASEAN: Periode Pra dan Pasca Krisis Ekonomi Global", "Analisis Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk Urea dan TSP terhadap Produksi Padi Capaian Swasembada Pangan di Indonesia", dan "Ekonomi dan Kebijakan Tarif Serat Kapas".

Izzaty, S.T., M.E.

Peneliti Muda III/c

Kepakaran Kebijakan Publik

izzaty@dpr.go.id



Lahir di Padang, 5 Desember 1977. Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Andalas Padang (2000) dan pendidikan S2 Perencanaan Kebijakan Publik Universitas Indonesia (2009). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Kebijakan Feed-in Tariff di Indonesia: Studi Kasus Energi Panas Bumi dan Energi Surya", "Analisis Kebijakan Unggulan Tol Laut Pemerintah Jokowi", dan "Pengembangan Wilayah Pesisir: Kinerja dan Prospek Pengelolaan Pesisir Terpadu".

Juli Panglima Saragih, Drs., M.M.

Peneliti Madya IV/b

Kepakaran Kebijakan Publik

juli.saragih@dpr.go.id



Lahir di Tebing Tinggi, 21 Juli 1964. Menyelesaikan pendidikan S1 dari Universitas Padjadjaran (1988) dan pendidikan S2 Magister Manajemen Universitas Nusantara (1999). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Sejarah Perminyakan di Indonesia", "Kebijakan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)", dan "Bauran Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi".



Lisnawati, S.Si, M.S.E.
Peneliti Pertama III/b
Kepakaran Ekonomi Terapan
lisnawati.dpr@gmail.com

Lahir di Jakarta, 8 September 1982. Menyelesaikan pendidikan S1 Matematika Universitas Indonesia (2005) dan pendidikan S2 Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia (2008). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", "Pembangunan Sektor Perikanan Laut dan Pemberdayaan Nelayan", dan "Implementasi Sistem Keuangan Pusat dan Daerah dalam Memperkuat Perekonomian Nasional".



Lukman Adam, S.Pi, M.Si.
Peneliti Muda III/d
Kepakaran Ilmu Kebijakan
mada.kenn@gmail.com

Lahir di Jakarta, 3 Maret 1978. Menyelesaikan pendidikan S1 Institut Pertanian Bogor (2001) dan pendidikan S2 di Institut Pertanian Bogor (2006). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Kemandirian Sektor Pertanian melalui Pengembangan Benih Pertanian", "Kebijakan Penentuan Harga Pembelian Beras Pemerintah", dan "Kebijakan Konektivitas Maritim di Indonesia".



Mandala Harefa, S.E., M.E.
Peneliti Utama IV/d
Kepakaran Kebijakan Ekonomi Publik
mondhias@yahoo.com

Lahir di Jakarta, 16 Mei 1962. Menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen dari Universitas Kristen Indonesia (1998) dan pendidikan S2 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (2003). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kebutuhan Perumahan", "Prioritas dan Tantangan Pembangunan Infrastuktur dalam Mendukung Pembangunan Perekonomian Nasional", dan "Tantangan Pengelolaan BUMN dalam Persaingan Usaha Sehat".

**Nidya Waras Sayekti, S.E., M.M.**

Peneliti Muda III/b

Kepakaran Ekonomi Terapan

nidya_ws@yahoo.com

Lahir di Jakarta, 3 Juli 1978. Menyelesaikan pendidikan Diploma Perbankan Politeknik Universitas Indonesia (1999), pendidikan S1 Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Mercu Buana (2003), dan pendidikan S2 Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Mercu Buana (2006). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Perkembangan Pasar Modal di Indonesia", "Peran Bapepam/LK dalam Sistem Pengawasan Pasar Modal di Indonesia", dan "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Pra dan Pasca UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah".

**Niken Paramita Purwanto, S.E., M.Ak.**

Peneliti Muda III/c

Kepakaran Kebijakan dan Administrasi

niken.paramita@dpr.go.id

Lahir di Jakarta, 25 Juni 1977. Menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen di Universitas Trisakti (2000) dan pendidikan S2 Magister Akuntansi di Universitas Indonesia (2006). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Otonomi Daerah dalam Kaitannya dengan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah", "Peraturan Pemerintah dan Persaingan Ritel Tradisional dan Modern", "Kebijakan Penguatan Industri Dalam Negeri".

**Rafika Sari, S.E., M.S.E.**

Peneliti Muda III/c

Kepakaran Kebijakan Publik

rafika.sari@dpr.go.id

Lahir di Jakarta, 7 Januari 1977. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Diponegoro (1999) dan pendidikan S2 Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia (2006). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal", "Reformasi Pengelolaan BUMN terkait Revisi UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN", dan "Efektivitas Dana Perimbangan dan Peranannya terhadap Pelayanan Publik dan Kesiapan Sektor Industri Agro Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015".



Rasbin, S.TP, M.S.E.

Peneliti Muda III/c

Kepakaran Ekonomi Terapan

ras9bin@yahoo.co.id

Lahir di Indramayu, 27 Juli 1981. Menyelesaikan pendidikan S1 Teknologi Industri Pertanian FATEKA, Institut Pertanian Bogor (2005) dan Magister Sains Ekonomi dari Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia (2008). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Pengaruh Variabel-Variabel Fundamental Makroekonomi dan Non-Ekonomi serta News (Berita) terhadap Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Periode 2004-2014", "Hubungan Kausal Dinamis Antarvariabel Makroekonomi di Indonesia dalam Kajian Krisis Ekonomi sebagai Kejutan Eksternal", dan "Early Warning System Krisis Keuangan di Indonesia: Tinjauan Teori dan Empiris Model-Model Parametrik".

Sahat Aditua Fandhiya Silalahi, S.T., M.B.A.

Peneliti Muda III/d

Kepakaran Kebijakan Publik

sahat.silalahi@dpr.go.id

Lahir di Sleman, 18 Mei 1981. Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung (2004) dan pendidikan S2 Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2009). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Kendali BUMN Telekomunikasi Pasca Privatisasi", "Studi Kasus Penyertaan Modal Negara pada PT. Kodja Bahari", dan "Kebijakan Perlindungan Aset pada Badan Usaha Milik Negara".

Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Peneliti Muda III/c

Kepakaran Ekonomi Terapan

sony_hendra@yahoo.com

Lahir di Jakarta 17 Februari 1981. Menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen Universitas Persada Indonesia YAI (2003) dan pendidikan S2 Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia (2007). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Prospek Redominasi di Indonesia", "Persaingan Usaha Bank Perkreditan Rakyat Dalam Penyaluran Kredit Ke Sektor UMKM", dan "Peningkatan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Bangsa: Pengembangan di Sektor UMKM".



Suhartono, S.I.P., M.P.P.

Peneliti Madya IV/a

Kepakaran Kebijakan Publik

suhartono@dpr.go.id

Lahir di Jakarta, 6 Agustus 1973. Menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1998) dan pendidikan S2 Public Policy Australian National University (2001). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Prioritas Pembangunan Indonesia: 2015-2019", "Agenda Pembangunan Nasional", dan "Efektivitas dan Akuntabilitas Dana Perimbangan".



T. Ade Surya, S.T., M.M.

Peneliti Muda III/c

Kepakaran Kebijakan Publik

teuku.surya@dpr.go.id

Lahir di Lhokseumawe, 24 Maret 1981. Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Industri Universitas Islam Indonesia (2006) dan pendidikan S2 Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2007). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Masalah Infrastruktur dalam Mengembangkan Industri Manufaktur", "Transisi Pemanfaatan Energi Terbarukan, Status dan Perspektif Kebijakan, Serta Kinerja", dan "Reorientasi Kebijakan Pembangunan dan Penguatan Infrastruktur Maritim".



Venti Eka Satya, S.E., M.Si., Ak., C.A.

Peneliti Muda III/d

Kepakaran Ekonomi Terapan

venti.eka@dpr.go.id

Lahir di Dumai, 16 Januari 1975. Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi Universitas Andalas Padang dan pendidikan S2 Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2007). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah Tahun 2013", "Analisis Kebijakan Pengelolaan Utang Negara: Manajemen Utang Pemerintah dan Permasalahannya", dan "Peran Akuntansi Forensik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".



Yuni Sudarwati, S.I.P., M.Si.

Peneliti Muda III/d

Kepakaran Bisnis dan Manajemen

yuni.sudarwati@dpr.go.id

Lahir di Purwokerto, 6 Juni 1977. Menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2000) dan pendidikan S2 Ilmu Manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2003). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Upaya Indonesia Menghadapi Migrasi Tenaga Kerja dalam Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) 2015", "Strategi Pengembangan Merek Usaha Mikro, Kecil dan Menengah", dan "Studi Perbandingan antara Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan Rancangan Undang-Undang Koperasi 2010".

BIDANG EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK (EKP)



021 5715 891

5. Bidang Kesejahteraan Sosial

Melakukan penelitian, pengkajian, dan analisis mengenai:

- Pembangunan SDM.
- Pendidikan, kebudayaan, kesenian, dan agama.
- Pemberdayaan perempuan.
- Kepemudaan dan olah raga.
- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Lingkungan hidup.
- Kependudukan, tenaga kerja, transmigrasi, pembangunan pedesaan, dan perkembangan perkotaan.
- Kesejahteraan masyarakat: kesehatan, jaminan sosial, masyarakat terasing, konflik dan diskriminasi, dan masalah-masalah sosial lain.

Nama	Jabatan	Kepakaran
Dr. Ujianto Singgih Prayitno, M.Si.	Peneliti Utama IV/d	Studi Masyarakat dan Sosiologi Perkotaan
Sali Susiana, S.Sos., M.Si.	Peneliti Utama IV/d	Studi Kemasyarakatan – Studi Khusus Gender
Dr. Hartini Retnaningsih, M.Si.	Peneliti Madya IV/b	Analisis Dampak Sosial dan Evaluasi Program
Dr. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.	Peneliti Madya IV/b	Sosiologi
Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.	Peneliti Madya IV/b	Kebijakan Lingkungan
Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.	Peneliti Madya IV/a	Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Dr. Achmad Muchaddam F., S.Ag., M.A.	Peneliti Madya III/d	Agama dan Masyarakat
Yulia Indahri, S.Pd., M.A.	Peneliti Madya III/d	Studi Masyarakat dan Sosiologi Perkotaan

Nama	Jabatan	Kepakaran
Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.	Peneliti Muda III/d	Kesehatan Lingkungan
Dina Martiany, S.H., M.Si.	Peneliti Muda III/d	Studi Kemasyarakatan – Studi Khusus Gender
Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si.	Peneliti Muda III/d	Sosiologi
Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.	Peneliti Muda III/d	Studi Pendidikan
Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.	Peneliti Muda III/d	DPR - Studi Masyarakat dan Sosiologi Perkotaan
Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.	Peneliti Muda III/d	Psikologi
Elga Andina, S.Psi., M.Psi.	Peneliti Muda III/c	Psikologi
Rahmi Yuningsih, S.K.M., M.K.M.	Peneliti Muda III/c	Kesehatan Masyarakat
Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.	Peneliti Muda III/c	Sosiologi
Teddy Prasetyawan, S.T., M.T.	Peneliti Muda III/c	Kebijakan Lingkungan
Lukman Nul Hakim, S.Psi., M.A.*)	Peneliti Pertama III/b	Psikologi

*) Sedang menempuh studi doktoral



Achmad Muchaddam F., Dr., S.Ag., M.A.

Peneliti Muda III/d

Kepakaran Agama dan Masyarakat

muchaddam@yahoo.com

Lahir di Surabaya, 21 Januari 1972. Menyelesaikan pendidikan S1 Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya (1996), pendidikan S2 Magister Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2002), dan pendidikan S3 Ilmu Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Penguatan Kewirausahaan di Pesantren melalui Program CSR", "Tokoh Agama Melawan Perdagangan Orang", dan "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya".

Anih Sri Suryani, S.Si., M.T.

Peneliti Muda III/d

Kepakaran Kesehatan Lingkungan

anihsss@yahoo.com

Lahir di Ciamis, 14 Oktober 1975. Menyelesaikan pendidikan S1 Geofisika dan Meteorologi Institut Teknologi Bandung (1999) dan pendidikan S2 Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (2003). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Pengelola Sampah (Studi Kasus Pengelolaan Sampah di Gianyar Bali)", "Peran Parlemen dalam Penanganan Emisi Gas Buang dari Sektor Transportasi Darat," dan "Kontribusi CSR dalam Pengelolaan Sampah"

Dina Martiany, S.H., M.Si.

Peneliti Muda III/d

Kepakaran Studi Kemasyarakatan – Studi Khusus Gender

dina8333@gmail.com

Lahir di Bandar Lampung, 16 Maret 1982. Menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung (2003) dan pendidikan S2 Pasca-Sarjana Kajian Wanita/Gender Universitas Indonesia (2007). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "CSR melalui Microfinance untuk Pemberdayaan Perempuan", "Kesetaraan Gender melalui Sustainable Development Goals (SDGs)", dan "Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Inklusif Disabilitas".



Dinar Wahyuni, S.Sos, M.Si.

Peneliti Muda III/d

Kepakaran Sosiologi

hi_dins@yahoo.com

Lahir di Yogyakarta, 8 Maret 1982. Menyelesaikan pendidikan S1 Sosiatri Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2004) dan pendidikan S2 Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2007). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Pencegahan Perdagangan Orang Berbasis Partisipasi Masyarakat", "Kontribusi Corporate Social Responsibility dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", dan "Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Komite Sekolah menuju Pembangunan Berkelanjutan".



Elga Andina, S.Psi., M.Psi.

Peneliti Muda III/c

Kepakaran Psikologi

elga.andina@dpr.go.id

Lahir di Padang, 28 Juni 1983. Menyelesaikan pendidikan S1 Psikologi Universitas Airlangga (2005) dan pendidikan S2 Profesi Psikologi Industri dan Organisasi Universitas Indonesia (2008). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Pelindungan bagi Kelompok Berisiko Gangguan Jiwa", "Budaya Kekerasan Antar Anak di Sekolah Dasar", dan "Layanan Kesehatan Jiwa Dasar di Era Jaminan Kesehatan Nasional".



Faridah Alawiyah, S.Pd., M.Pd.

Peneliti Muda III/d

Kepakaran Studi Pendidikan

faridahalawiyah@gmail.com

Lahir di Bandung, 18 April 1984. Menyelesaikan pendidikan S1 Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (2006) dan pendidikan S2 Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia (2008). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Program Indonesia Pintar dan Pembangunan Berkelanjutan", "Peran Sektor Pendidikan dalam Peningkatan Kualitas SDM sebagai Upaya Pencegahan dan Perdagangan Orang", dan "Perubahan Kebijakan Ujian Nasional 2015".



Hartini Retnaningsih, Dr., Dra., M.Si.

Peneliti Madya IV/b

Kepakaran Analisis Dampak Sosial dan Evaluasi Program
hartiniretnaning@yahoo.com

Lahir di Klaten, 25 April 1965. Menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro (1990), pendidikan S2 Sosiologi Universitas Indonesia (2000), dan pendidikan S3 Ilmu Kesejahteraan Sosial FISP UI (2016). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Dampak Sosial yang Diharapkan dan Kendala-Kendala dalam Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional", "Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial (Studi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara)", dan "Upaya Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia".



Lukman Nul Hakim, S.Psi., MA.

Peneliti Pertama III/b

Kepakaran Psikologi

luckey_knap@yahoo.com

Lahir di Jakarta, 26 Februari 1976. Menyelesaikan pendidikan S1 Psikologi Universitas Indonesia (2002), pendidikan S2 *Master of Arts in Psychology University of Jamia Milla Islamia* (2007), dan saat ini sedang menyelesaikan program Doktoral di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia sejak tahun 2012. Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Ulasan Metode Kualitatif: Wawancara terhadap Elit" dan "Meningkatkan Kualitas Perguruan Tinggi Lokal melalui Internasionalisasi Pendidikan Tinggi".

**Mohammad Mulyadi, Dr., AP., M.Si.**

Peneliti Madya IV/b

Kepakaran Sosiologi

mohammadmulyadi@yahoo.co.id

Lahir di Makassar, 13 Maret 1976. Menyelesaikan pendidikan Ahli Pemerintahan di STPDN (1998), pendidikan S2 Sosiologi Universitas Indonesia (2002), dan pendidikan S3 Ilmu Sosial Universitas Padjadjaran (2008). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif dan Kualitatif", "Dinamika Sosial Kehidupan di Desa", dan "Masalah Sosial dalam Pembangunan".

**Mohammad Teja, S.Sos., M.Si.**

Peneliti Muda III/c

Kepakaran Sosiologi

teja@dpr.go.id

Lahir di Muara Enim, 21 Juli 1976. Menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional Universitas Jayabaya (2000) dan pendidikan S2 Sosiologi Universitas Padjadjaran (2002). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Peran CSR dalam Upaya Meredam Konflik Sosial", "Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir", dan "Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Miskin di Pesisir Pantai".

**Rahmi Yuningsih, S.KM., M.K.M.**

Peneliti Muda III/c

Kepakaran Kesehatan Masyarakat

rahmi.yuningsih@yahoo.com, rahmi.yuningsih@dpr.go.id

Lahir di Jakarta, 22 Juli 1987. Menyelesaikan pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (2009) dan pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (2014). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Tinjauan Kebijakan Pengintegrasian Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional", "Kerja Sama Internasional dalam Menghadapi Ancaman Pandemi Penyakit Menular" dan "Pengembangan Profesionalisme Perawat melalui Rancangan Undang-Undang tentang Keperawatan".

**Rohani Budi Prihatin, Dr., S.Ag., M.Si.**

Peneliti Muda III/d

Kepakaran Studi Masyarakat dan Sosiologi Perkotaan

rohbudbud@gmail.com

Lahir di Karang Talun Kidul Purwojati Banyumas, 7 Juni 1973. Menyelesaikan pendidikan S1 Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1996), pendidikan S2 Sosiologi di Universitas Indonesia (2002), dan pendidikan S3 Studi Agama Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta (2009). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Problem Air Bersih di Perkotaan", "Mengurangi Masalah Banjir di Jakarta", dan "Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Sampah di Perkotaan".

**Sali Susiana, S.Sos., M.Si.**

Peneliti Utama IV/d

Kepakaran Studi Kemasyarakatan – Studi Khusus Gender

sali_susiana@yahoo.com

Lahir di Jakarta, 13 April 1971. Menyelesaikan pendidikan S1 Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1995) dan pendidikan S2 Kajian Wanita Universitas Indonesia (2005). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif", "Perda Diskriminatif dan Kekerasan terhadap Perempuan" dan "Perdagangan Orang dan Perlindungan terhadap Perempuan".

**Sri Nurhayati Qordiyatun, S.Sos., M.Si.**

Peneliti Madya IV/b

Kepakaran Kebijakan Lingkungan

qodri96@yahoo.com; sri.qodriyatun@dpr.go.id

Lahir di Yogyakarta, 19 November 1970. Menyelesaikan pendidikan S1 Sosiologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1993) dan pendidikan S2 Magister Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (2005). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Kota Batam melalui Pemberdayaan Masyarakat", "Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Kerangka Desentralisasi", dan "Kontribusi Perusahaan melalui Corporate Social Responsibility dalam Pencapaian Millennium Development Goals di Daerah".



Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.

Peneliti Muda III/d

Kepakaran Psikologi

suliswinurini@yahoo.com

Lahir di Jakarta, 5 November 1980. Menyelesaikan pendidikan S1 Psikologi Universitas Indonesia (2004) dan pendidikan S2 Psikologi Industri dan Organisasi Universitas Indonesia (2006). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Media Sosial dan Tantangan Mewujudkan Masyarakat yang Sehat", "Kontribusi Psychological First Aid (PFA) dalam Penanganan Korban Bencana Alam" dan "Fenomena Kecemasan pada Siswa saat Menghadapi Ujian Nasional".

Teddy Prasetyawan, S.T., MT.

Peneliti Muda III/c

Kepakaran Kebijakan Lingkungan

teddy@dpr.go.id



Lahir di Rejang Lebong, pada 25 Maret 1980. Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (2004) dan pendidikan S2 Magister Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (2008). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Peluang Implementasi Extended Producer Responsibility (EPR) di Indonesia", "Masa Depan Industri Air Minum dalam Kemasan (AMDk) Pascapembatalan UU No. 7 Tahun 2004", dan "Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Ketersediaan Air Baku PDAM Kabupaten Lebak".

Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.

Peneliti Madya IV/a

Kepakaran Kebijakan dan Manajemen Kesehatan

trini74@yahoo.com



Lahir di Jakarta, 8 Mei 1969. Menyelesaikan pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (1997) dan pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (2004). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan", "Peningkatan Akses Masyarakat Miskin terhadap Pelayanan Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional", dan "Kebijakan Penyediaan Obat di Era Jaminan Kesehatan Nasional".



Ujianto Singgih Prayitno, Dr., M.Si.

Peneliti Utama IV/d

Kepakaran Studi Masyarakat dan Sosiologi Perkotaan

ujiantosinggihpr@yahoo.com

Lahir di Jakarta, 19 November 1964. Menyelesaikan pendidikan S1 Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1989), pendidikan S2 Program Studi Sosiologi Universitas Indonesia (1997), dan pendidikan S3 Program Doktor Sosiologi Universitas Indonesia (2004). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Pencegahan Tindakan Korupsi dalam Perspektif Sosiologi", "Konseptualisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Perspektif Sosiologi", dan "Kearifan Lokal dan Perilaku Menyimpang: Perspektif Sosiologi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air".



Yulia Indahri, S.Pd., M.A.

Peneliti Madya III/d

Kepakaran Studi Masyarakat dan Sosiologi Perkotaan

y.indahri@gmail.com

Lahir di Jakarta, 22 Juli 1974. Menyelesaikan pendidikan S1 Teknologi Pendidikan IKIP Jakarta (1999) dan pendidikan S2 *Development Studies University of East Anglia*, Norwich (2003). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain adalah "Peran Parlemen dalam Penanggulangan Kemiskinan", "Pembangunan Kesehatan Daerah di Era Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Kasus Kota Kupang)", dan "Pembelajaran dari Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Aceh".

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL (KS)



021 5715 372



**RENCANA STRATEGIS
PUSAT PENELITIAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015–2019**

BAB I

PUSAT PENELITIAN BADAN KEAHLIAN DPR RI



1.1. Kondisi Umum

Renstra Pusat Penelitian 2015-2019 tidak dapat dilepaskan dari perkembangan lingkungan strategis yang memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penelitian. Dalam kurun waktu tersebut, Pusat Penelitian memberikan dukungan kepada anggota DPR terpilih periode 2014-2019. Anggota DPR RI periode 2014-2019 berjumlah 560 orang Anggota yang terpilih berdasarkan hasil Pemilu 2014. Adapun hasil perolehan kursi partai politik pada Pemilu 2014 adalah sebagai berikut:

1. PDI Perjuangan 109 kursi dari 23.681.471 (18,95%) suara;
2. Golkar 91 kursi dari 18.432.312 (14,75%) suara;
3. Gerindra 73 kursi 14.760.371 (11,81%) suara;
4. Demokrat 61 kursi 12.728.913 (10,19%) suara;
5. Partai Amanat Nasional 49 kursi dari 9.481.621 (7,59%) suara;
6. Partai Kebangkitan Bangsa 47 kursi dari 11.298.957 (9,04%) suara;
7. Partai Keadilan Sejahtera 40 kursi dari 8.480.204 (6,79%) suara;
8. Partai Persatuan Pembangunan 39 kursi dari 8.157.488 (6,53%) suara;
9. Nasional Demokrat 35 kursi dari 8.402.812 (6,72%) suara;
10. Hanura 16 kursi dari 6.579.498 (5,26%) suara.

Berdasarkan komposisi tersebut, terbentuk 10 Fraksi di DPR. Selanjutnya, untuk melaksanakan fungsi, wewenang, dan tugasnya, DPR membentuk alat kelengkapan, yaitu Pimpinan DPR, 11 Komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen,

Badan Urusan Rumah Tangga, dan Mahkamah Kehormatan Dewan. DPR beserta alat kelengkapannya, baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap, tersebut merupakan tujuan bagi pemberian dukungan yang akan dilakukan oleh sistem pendukung DPR RI, tidak terkecuali Pusat Penelitian.

Sistem pendukung DPR yang dalam hal ini adalah Sekretariat Jenderal DPR pada awal periode keanggotaan DPR RI 2014-2019 juga mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika yang berkembang. Perubahan tersebut berupa penataan organisasi yang antara lain dengan membentuk Inspektorat dan Badan Keahlian. Dengan demikian, pada awal masa kerja ini, sistem pendukung DPR akan disibukkan dengan penataan organisasi melalui penyiapan struktur organisasi, pengisian jabatan, dan penyusunan mekanisme kerja yang harus dilakukan dengan tidak meninggalkan fungsi utama mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR.

Pusat Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada tahun 2015 Bidang Pengkajian telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memberikan dukungan berupa laporan hasil penelitian, kajian/analisis, dan tugas-tugas tambahan lainnya. Laporan hasil penelitian yang telah diselesaikan berjumlah 17 laporan hasil penelitian kelompok dan 29 laporan hasil penelitian individu. Hasil kajian berupa buku yang diterbitkan berjumlah 27 buku tim dan 6 buku individu. Hasil kajian berupa jurnal berjumlah 12 jurnal, dengan perincian 4 jurnal kajian dan 8 jurnal bidang. Pada akhir tahun 2015, salah satu jurnal bidang kembali mendapatkan sertifikat terakreditasi dari LIPI, sehingga 2 dari 5 jurnal telah terakreditasi. Hasil kajian berupa Info Singkat yang telah diterbitkan berjumlah 24 analisis. Pusat Penelitian juga melaksanakan diskusi, seminar, dan lokakarya dalam rangka **menambah** wawasan dan mendapatkan masukan terhadap isu-isu yang berkembang. Selain itu, juga telah dilaksanakan tugas tambahan lain berupa keikutsertaan dalam penyusunan naskah pidato, penyusunan

laporan kinerja, pendampingan pada Alat Kelengkapan DPR dalam pembahasan RUU dan pansus pengawasan, penyusunan naskah akademik dan konsep RUU, pemantauan pelaksanaan undang-undang, dan beberapa keanggotaan tim di Sekretariat Jenderal DPR maupun tim pendamping pada Alat Kelengkapan Dewan.

Beberapa hasil kerja tersebut perlu terus ditingkatkan, khususnya agar dapat lebih tepat dan efektif dalam pemberian dukungan kepada DPR, termasuk memenuhi permintaan agar Pusat Penelitian mampu memberikan *quick respond* melalui dukungan kajian atau analisis secara cepat terhadap isu yang berkembang. Hal-hal lain dan yang paling utama adalah mewujudkan dukungan keahlian berupa hasil penelitian, kajian, dan pengembangan yang selaras dengan kebutuhan DPR, serta memberikan manfaat secara optimal.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

a. Regulasi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah memberikan landasan hukum bagi pengembangan Sistem Pendukung DPR RI. Pengembangan sistem dukungan tersebut dilakukan melalui pembentukan Badan Keahlian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 413 ayat (2) bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR, dibentuk Badan Keahlian DPR yang diatur dengan Peraturan Presiden. Dengan pembentukan Badan Keahlian DPR, dukungan keahlian terhadap DPR RI dapat lebih fokus dan optimal.

Amanat Undang-Undang untuk membentuk Badan Keahlian DPR telah direalisasikan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Salah satu fungsi yang dijalankan oleh Badan Keahlian DPR adalah penyiapan rumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan penelitian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka fungsi yang selama ini dijalankan oleh peneliti yang bernaung di Bidang Pengkajian pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi menjadi salah satu fungsi yang dijalankan oleh Badan Keahlian DPR.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan tersebut, Badan Keahlian terdiri atas:

- (1) Pusat Penelitian;
- (2) Pusat Perancangan Undang-Undang;
- (3) Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- (4) Pusat Kajian Anggaran;
- (5) Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- (7) Bagian Tata Usaha Badan Keahlian.

Dengan demikian, Bidang Pengkajian yang semula hanya setingkat Eselon II berubah menjadi Pusat Penelitian yang kedudukannya setara dengan Eselon II. Perubahan ini merupakan potensi bagi pengembangan Pusat Penelitian sekaligus potensi bagi peningkatan dukungan keahlian kepada DPR RI.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015, ditetapkan bahwa Pusat Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Penelitian;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Penelitian;

- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Penelitian;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Penelitian;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pengkajian dan penelitian;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan penelitian;
- g. Pelaksanaan dukungan evaluasi penelitian;
- h. Pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelitian;
- i. Pelaksanaan tata usaha Pusat Penelitian;
- j. Penyusunan laporan kinerja Pusat Penelitian; dan
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Pusat Penelitian yang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu peneliti dan dibantu oleh Subbagian Tata Usaha. Pemberian dasar hukum secara komprehensif mengenai kelembagaan dan fungsi Pusat Penelitian yang memberikan dukungan keahlian terhadap DPR sebagaimana dikemukakan merupakan potensi bagi optimalisasi fungsi.

Potensi berikutnya dari aspek regulasi adalah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sumber daya manusia yang berada di Pusat Penelitian. Sebagai Pegawai Negeri Sipil maka peneliti yang berada pada Pusat Penelitian merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang mengenai Aparatur Sipil Negara yang menggantikan Undang-Undang Kepegawaian sebelumnya, membawa paradigma tentang pembentukan aparatur sipil negara yang berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN, serta memperbaiki manajemen aparatur sipil negara.

Kerangka kelembagaan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR juga dinaungi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan.

Berdasarkan undang-undang tersebut, Lembaga litbang sebagai salah satu unsur kelembagaan dalam Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berfungsi menumbuhkan kemampuan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, lembaga litbang bertanggung jawab mencari berbagai invensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menggali potensi pendayagunaannya.

Dasar regulasi untuk organisasi pusat penelitian dan sumber daya manusia yang berada pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR, merupakan potensi bagi pengembangan organisasi ke depan untuk lebih berkembang, bermanfaat, dan memberikan dukungan keahlian yang optimal bagi kinerja DPR agar tercapai cita-cita nasional.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagai sebuah organisasi, Pusat Penelitian mempunyai potensi untuk berkembang secara lebih optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang keahlian, termasuk di dalamnya potensi sumber daya manusia (SDM). Potensi SDM tersebut dapat dilihat dari aspek kuantitas dan kualitas. Dari aspek kuantitas, SDM merupakan ujung tombak organisasi dalam melayani *stakeholder*. Sedangkan secara kualitas, SDM merupakan aset yang memiliki inisiatif untuk melakukan perubahan secara berkesinambungan. Potensi SDM sangat dipengaruhi oleh perubahan internal organisasi, perubahan permasalahan, tuntutan masyarakat dan tren global yang ada. SDM yang terdapat pada Pusat Penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu (1) kelompok jabatan fungsional peneliti; dan (2) pejabat dan staf tata usaha. Komposisi SDM Pusat Penelitian secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Komposisi SDM Pusat Penelitian

No.	Unsur	Jumlah
1.	Kepala Pusat	1 orang
2.	Peneliti	73 orang
3.	Kasubbag TU	1 orang
4.	Staf TU	5 orang
	Jumlah	80 orang

Sumber: Pusat Penelitian, Desember 2015

Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti yang berjumlah 73 orang tersebut dikelompokkan ke dalam lima bidang sebagai berikut:

Tabel 2
Pembidangan Peneliti Pusat Penelitian

No	Bidang	Jumlah
1.	Politik Dalam Negeri	7 orang
2.	Hukum	14 orang
3.	Kesejahteraan Sosial	19 orang
4.	Ekonomi dan Kebijakan Publik	26 orang
5.	Hubungan Internasional	7 orang
	Jumlah	73 orang

Sumber: Pusat Penelitian, 2015.

Dilihat dari aspek kualitas, sebagian besar peneliti memiliki tingkat pendidikan Strata 2 (S-2). Hingga saat ini telah terdapat 8 orang peneliti yang bergelar doktor (S-3). Hanya terdapat satu orang peneliti yang berlatar belakang pendidikan sarjana (S-1). Tingkat pendidikan para peneliti pada Pusat Penelitian secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Peneliti pada Pusat Penelitian

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Percentase (%)
S3	5 orang	10,5
S2*	67 orang	88,2
S1	1 orang	1,3
Jumlah	73 orang	100

Sumber: Pusat Penelitian, 2015.

*9 orang sedang menyelesaikan S3 di beberapa perguruan tinggi negeri

Sebagaimana kelompok jabatan fungsional lainnya, para peneliti juga memiliki jenjang kepangkatan tertentu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Jenjang kepangkatan peneliti Pusat Penelitian secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

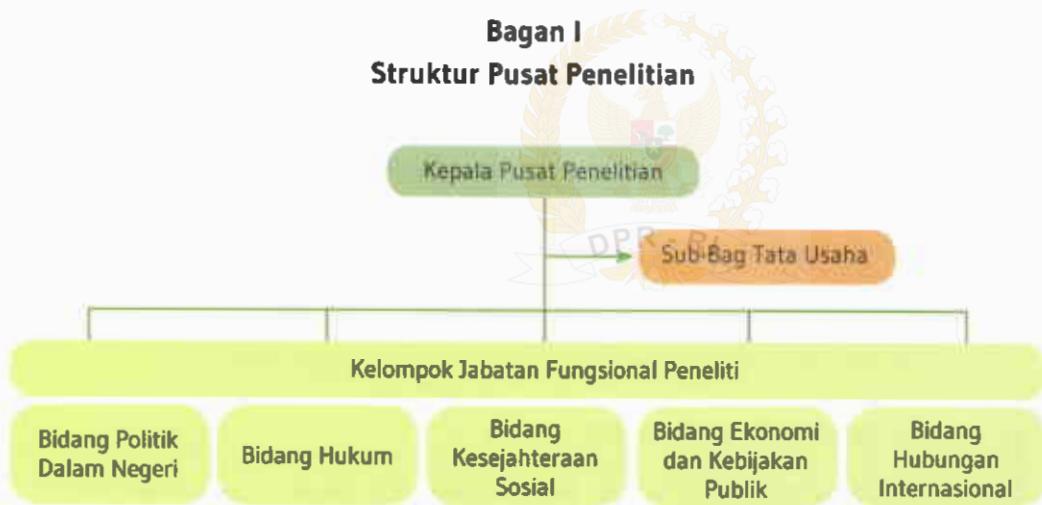
Tabel 4
Jenjang Kepangkatan Peneliti Pusat Penelitian

No	Jabatan Peneliti	Jumlah
1.	Peneliti Utama	6 orang
2.	Peneliti Madya	21 orang
3.	Peneliti Muda	45 orang
4.	Peneliti Pertama	1 orang
	Jumlah	73 orang

Sumber: Pusat Penelitian, 2015.

Selanjutnya, secara kelembagaan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR memiliki struktur sesuai Peraturan Sekjen DPR RI No. 6 Tahun 2015 yang tergambar dalam bagan berikut:

Bagan I
Struktur Pusat Penelitian



2. Permasalahan

a. Regulasi

Dari aspek regulasi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan mengatur secara umum, yaitu bagi lembaga litbang yang berupa organisasi yang berdiri sendiri, atau bagian dari organisasi pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, badan Internasional usaha, lembaga penunjang, dan organisasi masyarakat. Pengaturan secara umum dapat menjadi tidak relevan dengan format pusat penelitian yang berada di Badan Keahlian DPR.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan berpotensi untuk dapat lebih disempurnakan dan disesuaikan dengan format pusat

penelitian di DPR. Kemungkinan tersebut terbuka dengan dimasukkannya usul perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019, yang oleh DPR diusulkan dengan judul RUU Peneliti dan Penelitian Ilmu Pengetahuan.

Permasalahan dalam hal regulasi lainnya adalah mengenai pengaturan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penelitian yang sampai saat ini belum ditetapkan. Selain itu, peraturan-peraturan teknis dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang merupakan induk bagi para peneliti untuk pengembangan kariernya, perlu diperhatikan agar dapat dipertemukan kesesuaian dengan kebutuhan pengembangan sumber daya peneliti di Pusat Penelitian yang bertugas memberikan dukungan keahlian bagi pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR.

b. Sumber Daya Manusia

Secara historis, keberadaan peneliti yang ada pada Pusat Penelitian telah dirintis sejak tahun 1990. Pada saat itu peneliti dikelompokkan ke dalam sebuah unit kerja yaitu Bidang Pengkajian dan Analisis yang berada di bawah koordinasi Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I). Seiring dengan terjadinya perubahan organisasi dalam Sekretariat Jenderal DPR RI, P3I beberapa kali berganti nama/nomenklatur, antara lain Pusat Pengkajian dan Pengelolaan Informasi tahun 1995. Terakhir, sejak tahun 2005, sebelum berada di bawah Pusat Penelitian, para peneliti berada dalam unit kerja Bidang Pengkajian yang berada di bawah Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI).

Namun demikian, selama lebih dari dua dasa warsa tersebut penambahan jumlah peneliti sangat lambat karena adanya kebijakan *zero growth* dalam penerimaan pegawai. Pada awalnya jumlah peneliti sebanyak 16 orang. Selama bertahun-tahun kemudian, hanya terdapat penambahan beberapa orang peneliti baru sebagai pelimpahan pegawai dan/atau pengganti pegawai yang sudah pensiun di unit kerja lain. Oleh karena itu jumlah

peneliti hanya meningkat secara perlahan, dari 24 orang menjadi 34 orang, bahkan pernah turun menjadi 32 orang karena adanya mutasi beberapa orang peneliti, kemudian meningkat lagi menjadi 37 orang. Baru pada tahun 2009 terdapat penambahan 44 orang calon peneliti, sehingga pada tahun 2013 jumlah peneliti sebanyak 81 orang. Akan tetapi pada tahun 2014 jumlah ini berkurang menjadi 77 orang karena ada 1 orang peneliti yang mengajukan pensiun dini, 1 orang peneliti yang meninggal dunia, dan 1 orang peneliti pindah instansi dan 1 orang peneliti lainnya berhenti sementara dari jabatan peneliti. Saat ini peneliti berjumlah 76 orang.

Apabila dilihat secara kualitas, yang antara lain dapat dilihat dari tingkat pendidikan, kualifikasi dan kompetensi para peneliti sudah cukup memadai. Namun apabila dilihat dari kuantitas dan komposisi per bidang, jumlah peneliti pada Pusat Penelitian masih perlu ditambah agar perbandingan antara jumlah peneliti dengan jumlah Anggota DPR RI dan Alat Kelengkapan DPR RI lebih proporsional, sehingga peneliti dapat memberikan dukungan yang optimal kepada DPR RI. Di samping penambahan jumlah peneliti agar lebih berimbang antar-masing-masing bidang dan sesuai dengan kebutuhan DPR RI, kualifikasi atas peneliti itu sendiri memang perlu semakin diarahkan bagi kebutuhan dan dukungan pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI. Kualifikasi semacam ini diletakkan pada kapasitas profesional peneliti yang secara individual dan sekaligus tim dapat bekerja secara kelembagaan untuk benar-benar mendukung kinerja DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

c. Sarana dan Prasarana

Penambahan jumlah peneliti pada tahun 2010 belum diikuti dengan penambahan sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang dan meja kerja, komputer/laptop, serta printer. Selain **sarana** yang berupa fisik, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **Pusat Penelitian**, juga dibutuhkan sarana dan prasarana non-fisik seperti **akses** terhadap data dan informasi dari lembaga-lembaga lain, terutama lembaga penelitian.

d. Prosedur Operasi Standar/Standard Operating Procedure, dan Petunjuk Teknis

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penelitian perlu didukung dengan mekanisme kerja yang jelas. Saat ini sudah terdapat beberapa SOP yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penelitian, namun perlu disesuaikan kembali seiring dengan penataan organisasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR.



BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN PUSAT PENELITIAN BADAN KEAHLIAN DPR RI



2.1. Visi

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, terlihat bahwa Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI memiliki tugas yang sangat strategis dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, yaitu:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Penelitian;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Penelitian;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Penelitian;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Penelitian;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pengkajian dan penelitian;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan penelitian;
- g. Pelaksanaan dukungan evaluasi penelitian;
- h. Pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelitian;
- i. Pelaksanaan tata usaha Pusat Penelitian;
- j. Penyusunan laporan kinerja Pusat Penelitian; dan
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

Untuk itu Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI sebagai unsur pendukung dalam kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang keahlian merumuskan visi sebagai berikut:

MENJADI PUSAT PENELITIAN YANG PROFESIONAL, NETRAL, ANDAL, AKUNTABEL DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA PARLEMEN MODERN

Sehubungan dengan pemberian dukungan dalam pelaksanaan fungsi legislatif, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran dalam rangka pelaksanaan fungsi representasi serta menjalankan peran diplomasi parlemen DPR RI dalam mendukung terwujudnya Parlemen Modern, Pusat Penelitian BKD harus dapat memberikan dukungan keahlian kepada DPR melalui hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan.

Pengertian kata profesional, andal, dan akuntabel sebagaimana termuat dalam visi Pusat Penelitian BKD, mengandung makna:

Profesional: Mempunyai kepakaran dan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.

Netral: Mampu menjalankan tugasnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI dengan tidak berpihak pada pengaruh dan kepentingan apapun.

Andal: Mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan sejalan dengan pelaksanaan fungsi Dewan dalam mendukung terwujudnya Parlemen Modern.

Akuntabel: Mampu bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran DPR RI.

2.2. Misi

Untuk mewujudkan dan mendukung tercapainya visi Pusat Penelitian BKD dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan, maka ditetapkan misi Pusat Penelitian BKD adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional, netral, dan akuntabel;
2. Memberikan dukungan keahlian melalui kegiatan pengkajian yang profesional, netral, dan akuntabel;
3. Melakukan pengembangan kepakaran dan kompetensi SDM yang andal.

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pusat Penelitian BKD yang disusun untuk mencapai Visi: "Menjadi Pusat Penelitian yang profesional, netral, andal, akuntabel dalam mendukung terwujudnya Parlemen Modern."

Pada misi mengoptimalkan dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional dan akuntabel, Pusat Penelitian BKD melakukan penelitian yang sesuai dengan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dalam rangka mendukung terwujudnya Parlemen Modern. Untuk itu tahapan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian BKD berupa perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, penyusunan laporan penelitian dan sosialisasi hasil penelitian, dilakukan secara profesional dan akuntabel.

Untuk memberikan dukungan keahlian melalui kegiatan pengkajian yang profesional dan akuntabel, Pusat Penelitian BKD melakukan pengkajian yang sesuai dengan pelaksanaan fungsi Dewan, pemenuhan kebutuhan data dan informasi bagi Anggota dan atau Alat yang sejalan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI, analisis terhadap kebijakan

Pemerintah, serta memenuhi kebutuhan data dan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan fungsi Dewan. Kegiatan pengkajian yang dilakukan Pusat Penelitian BKD dilakukan secara profesional, netral, andal, dan akuntabel yang diwujudkan secara ilmiah dalam bentuk penulisan pada jurnal dan buku ilmiah, info singkat atau *pointers* kebijakan baik secara tercetak maupun *online*, serta diskusi atau seminar ilmiah di lingkungan internal Pusat Penelitian maupun berskala nasional.

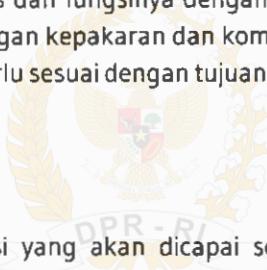
Pada misi melakukan pengembangan kepakaran dan kompetensi SDM yang andal, Pusat Penelitian BKD melakukan pengembangan kepakaran dan kompetensi SDM peneliti dan tata usaha Pusat Penelitian BKD yang sejalan dengan dinamika dukungan keahlian terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan. Pengembangan SDM Pusat Penelitian BKD dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas maupun kuantitas SDM Pusat Penelitian BKD. Bahwa pengembangan kualitas SDM Pusat Penelitian BKD dilakukan melalui peningkatan kepakaran dan kompetensi melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kepakaran, serta mengikuti berbagai kegiatan pertemuan ilmiah baik di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan pengembangan kuantitas SDM Pusat Penelitian BKD dilakukan melalui penyesuaian jumlah SDM Pusat Penelitian BKD yang sejalan dengan perbandingan rasio kecukupan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan.

2.3.Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tujuan Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan adalah:

1. Tercapainya dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional, netral, dan akuntabel;
2. Tercapainya dukungan keahlian melalui kegiatan pengkajian yang profesional, netral, dan akuntabel;
3. Tercapainya pengembangan kepakaran dan kompetensi SDM yang andal.

Tujuan pertama dan kedua berupa penelitian dan pengkajian merupakan penjabaran dari visi dan misi Pusat Penelitian BKD untuk meningkatkan kesesuaian hasil kerja (*output*) kualitas dukungan keahlian yang sesuai dengan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran agar DPR RI dapat melaksanaan tugas dan fungsinya dengan baik. Sedangkan tujuan ketiga berupa pengembangan kepakaran dan kompetensi SDM baik kualitas maupun kuantitasnya perlu sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan fungsi Dewan.



2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Pusat Penelitian BKD yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Adapun sasaran strategis Pusat Penellitian BKD adalah:

1. Terwujudnya dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional, netral, dan akuntabel;
2. Terwujudnya dukungan keahlian melalui kegiatan pengkajian yang profesional, netral, dan akuntabel;
3. Terwujudnya pengembangan kepakaran dan kompetensi SDM yang andal.

Sasaran strategis dari terwujudnya dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional dan akuntabel dilakukan oleh Pusat Penelitian BKD dengan menyesuaikan hasil kerja yang mencerminkan pengaruh yang ditimbukannya dengan apa yang menjadi kebutuhan riil (*outcome*) dari pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPR RI. Bahwa dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian harus bersumber dari materi yang berasal dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas), maupun materi yang berasal dari permintaan AKD terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dan atau anggaran yang akan atau sedang dibahas. Untuk itu penyelesaian

maupun penyerahan hasil penelitian akan sejalan dengan dinamika substansi dan atau waktu penyelesaian dari pelaksanaan fungsi Dewan. Kondisi ini penting agar setiap hasil penelitian yang dihasilkan Pusat Penelitian BKD memiliki hasil guna kemanfaatan (*outcome*) yang sesuai dengan kebutuhan substansi dan waktu dari pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPR RI serta mendukung percepatan tercapainya DPR RI menjadi Parlemen Modern.

Sasaran strategis dari terwujudnya dukungan keahlian melalui kegiatan pengkajian yang profesional dan akuntabel, perlu dilakukan dengan memastikan bahwa baik hasil kerja Pusat Penelitian BKD dapat digunakan pada pelaksanaan tugas dan wewenang AKD. Bawa pengkajian terhadap berbagai masalah yang sedang dibahas oleh DPR RI dan atau kebijakan yang akan atau sudah dihasilkan Pemerintah, pada akhirnya akan mampu menjadi sumber data dan atau informasi bagi Dewan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Terwujudnya pengembangan kepakaran dan kompetensi SDM yang andal sebagai sasaran strategis sangat penting sebagai upaya memaksimalkan dukungan keahlian Pusat Penelitian BKD terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI menuju kearah terbentuknya Parlemen Modern. Untuk itu kesesuaian kualitas kompetensi SDM Pusat Penelitian BKD akan selalu diarahkan pada upaya memaksimalkan dukungan keahlian secara kelembagaan Pusat Penelitian BKD pada pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. Hal ini juga sejalan dengan sisi kuantitas rasio kecukupan perbandingan jumlah SDM Pusat Penelitian BKD dengan kemanfaatan yang dihasilkan (*outcome*) dari dukungan keahlian yang diberikan kepada Dewan dalam rangka menuju Parlemen Modern.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam RPJMN bidang politik, arah kebijakan dan strategi nasional diarahkan pada menguatnya peran lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan di Indonesia terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing lembaga perwakilan tersebut didukung oleh Sekretariat Jenderal (Setjen).

Untuk lingkungan BKD, arah kebijakan kelembagaan sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam dasar menimbang Perpres ini jelas disebutkan arah kebijakan Setjen DPR RI adalah mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang administrasi dan persidangan, sedangkan arah kebijakan Badan Keahlian adalah mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang keahlian.

Dalam perpres ini dinyatakan bahwa Setjen DPR RI dan Badan Keahlian yaitu aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI.

Untuk menindaklanjuti arah kebijakan Setjen DPR RI sebagaimana tertuang dalam perpres tersebut, Sekjen DPR RI telah menerbitkan Peraturan Sekjen No 6/SEKJEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Persekjen ini menjadi dasar bagi lembaga Sekjen untuk membentuk perencanaan strategis untuk 4 tahun ke depan (2016–2019) untuk merevisi Rencana Strategis Tahun 2015–2019 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal nomor: 1266/SEKJEN/2014.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI

Arah kebijakan dan strategi kelembagaan Setjen DPR dituangkan melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI. Adapun sasaran strategi dalam pelaksanaan program ini adalah dengan:

- 1. Terwujudnya dukungan administrasi DPR RI, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian Dewan.**
 - 1) Menyelenggarakan dukungan keprotokolan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian.
 - 2) Melaksanakan dukungan di bidang hukum dan layanan pengaduan masyarakat.
 - 3) Pengelolaan manajemen kepegawaian, pelaksanaan administrasi keanggotaan, pengelolaan pegawai tidak tetap, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan pelayanan kesehatan.
 - 4) Menyelenggarakan perencanaan program dan anggaran, pengendalian pelaksanaan anggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, serta administrasi perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian.
 - 5) Menyelenggarakan pengelolaan barang milik negara, pengelolaan gedung dan instalasi, pengelolaan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta pengelolaan wisma Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - 6) Menyelenggarakan layanan pengadaan, pengelolaan persuratan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan, pelayanan kendaraan dinas, dan pengelolaan pengamanan.

- 2. Terwujudnya dukungan persidangan seluruh Alat Kelengkapan Dewan dan terselenggaranya pemberitaan parlemen.**
 - 1) Menyelenggarakan dukungan persidangan komisi dan persidangan paripurna.
 - 2) Menyelenggarakan dukungan persidangan kepada Badan, Mahkamah, dan Panitia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - 3) Menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kerja sama antar-parlemen dan layanan alih bahasa.
 - 4) Menyelenggarakan dukungan kesekretariatan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal serta dukungan persidangan kepada Badan Musyawarah.
 - 5) Menyelenggarakan dukungan pemberitaan, pelayanan informasi, kehumasan, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan.
- 3. Terwujudnya dukungan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian.**
 - 1) Melaksanakan pengawasan intern bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Pusat Data dan Informasi.
 - 2) Melaksanakan pengawasan intern bidang keuangan, kinerja, dan umum di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dan Badan Keahlian.
- 4. Terwujudnya dukungan data dan informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan dan publik serta terselenggaranya pendidikan dan pelatihan ASN.**
 - 1) Melaksanakan layanan perpustakaan, pengolahan data dan teknologi informasi, pengarsipan, dan risalah rapat.
 - 2) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Kelembagaan Badan Keahlian

Arah kebijakan dan strategi Badan Keahlian dituangkan melalui Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan. Adapun sasaran strategi dalam pelaksanaan program ini adalah dengan:

- 1. Terwujudnya dukungan keahlian di Bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI.**
 - 1) Mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang legislasi dalam perancangan undang-undang.
 - 2) Mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
 - 3) Mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang anggaran dalam penyusunan dan penetapan anggaran.
 - 4) Mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang anggaran dalam pelaksanaan dan pengawasan anggaran.
- 2. Terwujudnya dukungan keahlian melalui Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI menuju Parlemen Modern.**
 - 1) Melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menuju Parlemen Modern.

3.4. Kerangka Regulasi

Eksistensi kelembagaan Setjen DPR RI dan Badan Keahlian tidak terlepas dari kelembagaan DPR RI, mengingat kelembagaan Setjen DPR RI dan Badan Keahlian mempunyai tugas dan fungsi memberikan dukungan teknis, administrasi, dan keahlian bagi DPR RI. Sementara pengaturan tentang kelembagaan Sekjen DPR RI tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Pengaturan tentang kelembagaan Setjen DPR RI dalam UU MD3 tertuang dalam Pasal 413–415

UU MD3. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sekjen DPR RI diatur dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dalam Pasal 295–298.

Untuk menindaklanjuti arah kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan oleh Sekjen DPR RI ditetapkanlah sejumlah regulasi, baik dalam bentuk Peraturan Sekjen DPRI, maupun Keputusan Sekjen DPR RI. Melalui pembentukan kedua peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekjen DPR RI dapat diimplementasikan dengan baik, baik dari segi penguatan dasar hukum atas kegiatan maupun rencana kegiatan Sekjen DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3.5. Kerangka Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI

Kelembagaan Setjen DPR RI ada sebagai unsur pendukung DPR RI sejak tahun 1945 sampai saat ini. Tetapi di era DPR RI 2009–2014, eksistensi kelembagaan Setjen DPR RI mulai dikembangkan. Pengembangan kelembagaan Setjen DPR RI tergambar dalam Renstra DPR RI Tahun 2010–2014, dalam renstra tersebut direncanakan kelembagaan DPR RI akan dibantu oleh: 1) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2) Badan Fungsional Keahlian (BFK), dan 3) Unit Pengawasan Internal.

Keinginan untuk mengembangkan kelembagaan Setjen DPR RI sebagaimana direncanakan dalam Renstra DPR RI tahun 2010–2014 kembali ditegaskan dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI 2014. Dalam kedua UU tersebut, jelas disebutkan adanya rencana lembaga DPR RI untuk mengembangkan unit pendukung DPR RI melalui lembaga Setjen DPR RI dengan lembaga Badan Keahlian DPR RI (BKD).

Perubahan struktur dan ketatalaksanaan Setjen DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam UU tersebut telah dilaksanakan dan telah disahkan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Penetapan target dan kerangka pendanaan Renstra Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 2015–2019 dijabarkan dalam tiga kelompok, yaitu target kinerja dan kerangka pendanaan dari sasaran strategis, kerangka pendanaan pendukung sasaran strategis, dan target kinerja skala prioritas.

4.1. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Sasaran Strategis

1. Dukungan keahlian melalui pelaksanaan penelitian guna mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dukungan keahlian ini diharapkan memberikan hasil (outcome) berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas penelitian di bidang Hukum.
- 2) Meningkatnya kualitas penelitian di bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik.
- 3) Meningkatnya kualitas penelitian di bidang Kesejahteraan Sosial.
- 4) Meningkatnya kualitas penelitian di bidang Politik Dalam Negeri.
- 5) Meningkatnya kualitas penelitian di bidang Hubungan Internasional.
- 6) Meningkatkan kualitas penelitian yang bersifat lintas bidang.

Untuk melaksanakan dukungan keahlian tersebut, selama kurun waktu 2015–2019 dibutuhkan anggaran sebesar Rpxxx.xxx.xxx.

2. Dukungan keahlian melalui pelaksanaan pengkajian guna mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

- 1) Meningkatnya kualitas kajian yang disusun dalam buku dari 5 (lima) bidang.
- 2) Meningkatnya kualitas kajian yang disusun dalam jurnal dari 5 (lima) bidang.

- 3) Meningkatnya kualitas kajian yang disusun dalam sebuah info singkat dari 5 (lima) bidang.
- 4) Meningkatnya kualitas kajian yang disusun dalam sebuah *policy paper*.
- 5) Meningkatnya kualitas kajian yang disusun dalam sebuah *policy brief* berdasarkan isu kebijakan yang berkembang di Alat Kelengkapan DPR.
- 6) Meningkatkan kualitas kajian melalui pelaksanaan perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi.

Untuk melaksanakan dukungan keahlian tersebut, selama kurun waktu 2015–2019 dibutuhkan anggaran sebesar Rpxxx.xxx.xxx.

3. Dukungan keahlian melalui pelaksanaan pengembangan guna mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

- 1) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia berdasarkan standar profesi.
- 2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dasar dan lanjutan.
- 3) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui keikutsertaan dalam forum ilmiah.
- 4) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan konferensi, seminar, dan diskusi.
- 5) Meningkatkan kualitas pengembangan melalui pelaksanaan perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi.

Untuk melaksanakan dukungan keahlian tersebut, selama kurun waktu 2015–2019 dibutuhkan anggaran sebesar Rpxxx.xxx.xxx.

4.2. Target Pencapaian Indikator Kinerja Umum

Tujuan	Sasaran	Output	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
	Meningkatnya kualitas penelitian di bidang Hukum	Jumlah laporan hasil penelitian kelompok.					
	Meningkatnya kualitas penelitian di bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik	Jumlah laporan hasil penelitian kelompok.					
	Meningkatnya kualitas penelitian di bidang Kesejahteraan Sosial.	Jumlah laporan hasil penelitian kelompok.					
	Meningkatnya kualitas penelitian di bidang Politik Dalam Negeri.	Jumlah laporan hasil penelitian kelompok.					
	Meningkatnya kualitas penelitian di bidang Hubungan Internasional.	Jumlah laporan hasil penelitian kelompok.					

Tujuan	Sasaran	Output	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
Tercapainya dukungan keahlian melalui pengkajian	Meningkatnya kualitas penelitian lintas bidang	Jumlah laporan hasil penelitian lintas tim.					
	Meningkatnya kualitas penelitian individu	Jumlah laporan hasil penelitian individu.	48	48	48	48	48
	Meningkatnya kualitas kajian yang disusun dalam buku dari 5 (lima) bidang.	Jumlah buku.	29				
	Meningkatnya kualitas kajian yang disusun dalam jurnal dari 5 (lima) bidang.	Jumlah jurnal.	12	12	12	12	12
	Meningkatnya kualitas kajian yang disusun dalam sebuah info singkat dari 5 (lima) bidang.	Jumlah info singkat.	24	24	24	24	24

Tujuan	Sasaran	Output	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas kajian yang disusun dalam sebuah <i>policy paper</i> .	Meningkatnya kualitas kajian yang disusun dalam <i>policy paper</i> .	Jumlah <i>policy paper</i> .	48	48	48	48	48
	Meningkatnya kualitas kajian yang disusun dalam <i>policy brief</i> .	Jumlah <i>policy brief</i> .	48	48	48	48	48
	Meningkatnya kualitas penelitian melalui pelaksanaan perencanaan, <i>monitoring</i> dan evaluasi.	Jumlah buku.	48	48	48	48	48
Tercapainya dukungan keahlian melalui pengkajian	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia berdasarkan standar profesi.	Jumlah jurnal.	10%	10%	10%	10%	10%

Tujuan	Sasaran	Output	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dasar dan lanjutan	Percentase peneliti yang mengikuti diklat	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui keikutsertaan dalam forum ilmiah	Percentase peneliti yang mengikuti forum ilmiah	50%	50%	50%	50%	50%
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan konferensi, seminar dan diskusi	Percentase peneliti yang mengikuti forum ilmiah	50%	50%	50%	50%	50%
	Meningkatnya kualitas pengembangan melalui pelaksanaan perencanaan, monitoring, dan evaluasi	Jumlah laporan hasil rapat	48	48	48	48	48

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Periode 2015–2019 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penelitian untuk 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, serta arah kebijakan dan strategi Pusat Penelitian, sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penelitian dalam melaksanakan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Periode 2015–2019 ini akan ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan, staf, dan para peneliti yang ada di Pusat Penelitian. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Periode 2015–2019, maka setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, sesuai dengan tuntutan dan dinamika organisasi Badan Keahlian DPR RI dan Pusat Penelitian, dapat dilakukan perubahan terhadap Renstra Pusat Penelitian Periode 2015–2019. Perubahan tersebut akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tugas utama Pusat Penelitian, yaitu melaksanakan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI.

Renstra Pusat Penelitian Periode 2015–2019 harus dijadikan acuan kerja bagi seluruh pegawai yang ada di lingkungan Pusat Penelitian, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua pegawai dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*), sehingga visi menjadi pusat penelitian yang profesional, andal, dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya parlemen modern dapat dicapai.